

TANTANGAN PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Taufikurrahman

Universitas Pembangunan Nasional “UPN” Veteran Jatim

Taufik.100493@gmail.com

Abstrak

Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia diseluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Untuk memisahkan ilmu agama dengan kurikulum disekolah sehingga dalam system pendidikan pada saat itu pendidikan agama sama sekali tidak diajarkan disekolah-sekolah mereka menganggap pendidikan agama adalah tanggung jawab orang tua dirumah. Kebijakan pemerintah Belanda terhadap pendidikan di Indonesia sangat diskriminatif baik secara social, ras, anggaran, maupun pemeluk agama terhadap agama. Sejak pada zaman penjajahan pendidikan agama mengalami dokotomi bahkan sampai pada era kemerdekaan dan post-kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka didirikan kementerian Agama RI pada tanggal 3 Januari 1946. Salah satu tugas dari kementerian agama adalah mengurus penyelenggaraan pendidikan agama. Sedangkan tugas dari kementerian pendidikan dan kebudayaan mengurus sekolah umum. Dengan dibentuknya departemen agama tersebut diharapkan menjadi angin segar terhadap lembaga pendidikan Islam.

Abstract

Globalization is the interrelation and dependence between nations and between people throughout the world through trade, investment, travel, popular culture, and other forms of interaction so that the borders of the country become faster. To discuss the science of religion with the secret teaching of the education system at that time religious education was equally not taught in schools they considered religious education to be responsible for parents at home. Dutch government policy towards education in Indonesia is very discriminatory in terms of social, racial, budgetary, and religious affiliation. Since the colonial era, religious education went beyond docotomy even to the era of independence and post-independence. After the independence of Indonesia was established the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia on January 3, 1946. One of the tasks of the Ministry of Religion was the management of religious education institutions. While the tasks of the ministries of education and agriculture manage public schools. The establishment of the religious department is expected to be a breath of fresh air towards the establishment of Islamic education

A. PENDAHULUAN

Sejak zaman penjajahan, bangsa Indonesia telah memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Namun, pelaksanaannya masih diwarnai oleh kepentingan politik kaum penjajah, sehingga tujuan pendidikan yang hendak dicapai disesuaikan dengan kepentingan mereka. Setelah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, bangsa Indonesia menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan. Bangsa Indonesia yang merupakan bangsa yang majemuk terutama dalam agama menjadikannya system pendidikan terbagi menjadi dua yaitu pendidikan yang berbasis agama dan pendidikan yang berbasis umum. Dalam perjalanan pendidikan Indonesia (pendidikan agama) banyak mengalami kebijakan dan perubahan baik perubahan yang sederhana maupun yang kompleks. Oleh karena itu perlu analisis dalam setiap kebijakan melihat pendidikan agama merupakan pendidikan tertua di dalam sejarah bangsa Indonesia.

Tantangan yang selanjutnya ialah Trend dunia pendidikan abad ke-21 yang lebih mengutamakan pengembangan potensi manusia dibandingkan mengeksplorasi dan mengeksplorasi nilai fitrah manusia secara utuh. Pergeseran trend nilai pendidikan ini menjadikannya krisis nilai dalam kehidupan. Pada era globalisasi ini zaman yang penuh dengan tantangan, zaman yang mewajibkan untuk bergelut dengan medernisasi dan teknologi mengindikasikan bahwa saat ini manusia diwajibkan akan ilmu pengetahuan (knowledge).

Oleh karena itu perlunya benteng untuk tetap berada dalam tatanan syari'at Islam. Globalisasi yang mencakup ide, gaya hidup, dan nilai-nilai cultural akan bersentuhan langsung dengan budaya kita¹ Globalisasi membawa dampak yang sangat luar biasa pengaruh budaya yang semakin bebas menyebabkan keterasingan terhadap masyarakat tradisonal dan menyebabkan kebingungan. Permasalahan mendasar yang di hadapi oleh lembaga pendidikan pada saat ini adalah moral² William Kilpatrick yang dikutip oleh Thomas Lickona dalam bukunya *Educating for Character* mengatakan pentingnya pendidikan moral dalam pendidikan,

¹ Maman A Djauhari, "Pendidikan untuk Apa...?", (*Jurnal Sositologi*), (Desember 2006), hlm. 116.

"*Internasional institute for strategic studies, AS, memberikan definisi bahwa globalisasi transnasional flow of goods, money, ideas, lifestyle, and culture values*"

² Thomas Lickona, *Educating for Character Mendidik Untuk Membentuk Karakter*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 3

perkembangan ilmu pengetahuan bergantung pada pendidikan karakter. Oleh karena itu pendidikan islam harus tetap eksis dalam rangka membangun bangsa Indonesia yang religius dan berintelektual bisa menjawab tantangan zaman yang terus berkembang pesat dan tentunya tetap mempertahankan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

B. METODOLOGI

Berdasarkan paparan sebelumnya artikel ini difokuskan pada Tantangan Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Perubahan Kebijakan Pendidikan Islam. Melalui kerangka fokus penelitian tersebut maka artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka. Oleh karena itu pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan dengan kajian literatur dengan memuat tema-tema yang sesuai. Sumber data artikel berasal dari literatur mengenai peradaban Islam pada masa al-khulafa al-rasyidin yang berupa buku jurnal artikel dll. Sedangkan teknis analisis datanya menggunakan *content analysis* yang dimaknai sebagai metode analisis tentang isi pesan yang sesuai dengan tema.

C. PEMBAHASAN

1. Tantangan Dunia Pendidikan

Dilihat dari pandangan antropologik, melihat pendidikan dari aspek budaya antara lain pemindahan pengetahuan dan nilai-nilai kepada generasi Pendekatan sistem perlu dipergunakan dalam menjelaskan pendidikan, karena pada era global ini dunia pendidikan telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi hal ihwal. Proses pendidikan merupakan upaya yang mempunyai dua arah, yaitu; pertama, bersifat menjaga kelangsungan hidupnya (*maintenance synergy*) untuk kehidupan masa depan, dan yang kedua; menghasilkan sesuatu.

Ciri utama manusia masa depan Indonesia yang sangat diharapkan adalah manusia yang mendidik diri sendiri sepanjang hayat dan masyarakat belajar yang terbuka tetapi memiliki pandangan hidup yang mantap. Maka peserta didik harus dibekali informasi tentang latar belakang yang memberi dampak positif pada pembelajarannya sehingga dapat memberikan motivasi yang besar untuk membaca dan mempelajari informasi dari berbagai sumber. Setiap lembaga pendidikan harus membekali peserta didiknya dengan berbagai kompetensi agar siswa eksis di era global yang sangat kompetitif, maka sangat strategis dalam pembudayaan

pembelajaran disekolah dengan menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran dalam proses pencarian informasi. Melihat perkembangan ini, setiap pendidik dapat mempersiapkan peserta didiknya untuk eksis dan dinamis, maka pendidik semestinya dapat mengembangkan kemampuan meng-antisipasi, mengerti dan mengatasi situasi dan tantangan saat ini dengan mengakomodasi serta mereorientasi visi, misi dan tujuan pendidikan yang terus disosialisasikan terhadap peserta didiknya.

Pendidikan di abad ke-21 menunjuk-kan terjadinya dikotomi antara pendidikan barat yang cenderung sekuler dan pendidikan Islam yang terkungkung dalam dogma yang kaku. Menyadari kekeliruan tersebut, muncul paham yang berusaha mengintegrasikan Islam dan pengetahuan atau biasa disebut Islamisasi ilmu pengetahuan yang berujung pada internalisasi nilai-nilai Islam dalam ilmu modern. Pendidikan Islam menurut Zakiah Daradjat merupakan pendidikan yang lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain yang bersifat teoretis dan praktis Pesantren sebagai lembaga resmi pendidikan Islam di Indonesia mempunyai peranan penting dalam membangun pendidikan Indonesia secara keseluruhan.

Ciri utama manusia masa depan Indonesia yang sangat diharapkan adalah manusia yang mendidik diri sendiri sepanjang hayat dan masyarakat belajar yang terbuka tetapi memiliki pandangan hidup yang mantap. Maka peserta didik harus dibekali informasi tentang latar belakang yang memberi dampak positif pada pembelajarannya sehingga dapat memberikan motivasi yang besar untuk membaca dan mempelajari informasi dari berbagai sumber. Setiap lembaga pendidikan harus membekali peserta didiknya dengan berbagai kompetensi agar siswa eksis di era global yang sangat kompetitif, maka sangat strategis dalam pembudayaan pembelajaran disekolah dengan menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran dalam proses pencarian informasi. Melihat perkembangan ini, setiap pendidik dapat mempersiapkan peserta didiknya untuk eksis dan dinamis, maka pendidik semestinya dapat mengembangkan kemampuan meng-antisipasi, mengerti dan mengatasi situasi dan tantangan saat ini dengan mengakomodasi serta

mereorientasi visi, misi dan tujuan pendidikan yang terus disosialisasikan terhadap peserta didiknya.

Dengan demikian, eraglobalisasi adalah tantangan besar bagi dunia pendidikan. Dalam konteks ini, Khaerudin Kurniawan memerinci berbagai tantangan pendidikan menghadapi era global, antara lain :

- a. Tantangan untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas kerja nasional serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan
- b. Tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif terhadap terjadinya era reformasi dan transformasi struktur masyarakat, dari masyarakat tradisional dan agraris ke masyarakat modern industrial dan informasi-komunikasi, serta bagaimana implikasinya bagi peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupan SDM.
- c. Tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu meningkatkan daya saing bangsa dalam menghasilkan karya-karya kreatif yang berkualitas sebagai hasil pemikiran, penemuan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- d. Tantangan terhadap munculnya inovasi dan kolonialisme baru di bidang Iptek, yang menggantikan invasi dan kolonialisme di bidang politik dan ekonomi.³

Semua tantangan tersebut menuntut adanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing di bidang-bidang tersebut secara komprehensif dan komparatif yang berwawasan keunggulan, keahlian profesional, berpandangan jauh ke depan (visioner), rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi serta memiliki keterampilan yang memadai sesuai kebutuhan dan daya tawar pasar. Kemampuan-kemampuan itu harus dapat diwujudkan dalam proses pendidikan Islam yang berkualitas, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, unggul dan profesional, yang akhirnya dapat menjadi teladan yang dicita-citakan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.⁴

³www.academia.edu/12552898/Tantangan_Pendidikan_di_Era_Global, diposting tanggal 29 Desember 2020. Di akses pada jam 8.48 WIB

⁴ Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2009), hlm 27

Pertanyaan selanjutnya, apakah yang harus dilakukan oleh dunia pendidikan Islam? Untuk menjawabnya, agaknya kita perlu menengok kerangka pendidikan Islam dalam konteks ke nasionalan, sehingga perlu menyiapkan strategi yang tepat menghadapi sebuah tantangan sekaligus peluang tersebut.

1) Tantangan Globalisasi

Globalisasi merupakan suatu keniscayaan bagi semua bangsa, termasuk Indonesia. Bangsa Indonesia juga sudah merasakan bagaimana manis dan pahitnya terbawa arus globalisasi. Globalisasi akan membawa perubahan yang mencakup hampir semua aspek kehidupan, termasuk bidang teknologi, sosial dan pendidikan. Globalisasi dunia dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat cepat. Kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi itu memungkinkan transaksi business cukup dilakukan lewat kaca komputer. Jasa perbankan disaku dan genggam tangan. Rentang jarak antar benua sudah bukan lagi hambatan bagi manusia untuk saling berkomunikasi melalui berbagai jejaring sosial. Temuan chip komputer akan memungkinkan seseorang membawa komputer dalam saku bajunya.

Globalisasi menjadi tanggapan serius yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Kehidupan yang sudah tidak mengenal ruang mewajibkan manusia harus mengantisipasi perubahan zaman yang sangat begitu cepat, masyarakat dituntut untuk bisa mengikuti arus zaman akan tetapi di lain sisi masyarakat harus bisa menangkis tantangan dalam dunia globalisasi. Globalisasi ditandai dengan perdagangan bebas baik barang maupun jasa, modal dan tenaga kerja (free flow of goods, service, capital, and man power).⁵

Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia diseluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit.⁶ Globalisasi menjadi tantangan dalam kehidupan manusia dengan menyempitnya ruang dan waktu manusia harus bisa

⁵ Mochtar Bukhari, *Transformasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 205.

⁶ Nurhaidah, M. InsyaMusa, "Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia" *JURNAL PESONA DASAR*, Vol.3No.3, April 2015, hal

berperan dalam setiap perubahan. Globalisasi secara fisik ditandai dengan kota-kota yang menjadi bagian jaringan kota dunia, telekomunikasi, jaringan dan transformasi yang sudah bertaraf internasional. Dampak positif pada globalisasi ialah perubahan nilai tatanan kehidupan yang semakin maju, berkembangnya teknologi dan informasi mudah untuk di akses. Sedangkan dampak negative dari globalisasi ialah pola hidup konsumtif dan sikap individualistic, westernisasi dan menipisnya kehidupan social (kesenjangan social). Bagi negara Indonesia yang merupakan Negara berkebudayaan sangat rentan sekali hilangnya nilai asas kebangsaan yang sudah menjadi citra kehidupan. Oleh karena itu perlunya benteng untuk bisa menangkal. Anthony Giddens mengatakan bahwa globalisasi membawa dampak maha hebat terhadap ruang dan waktu yang mengalami percepatan dalam bahasanya ia mengistilahkan dengan (*time space distanziation*).⁷

Globalisasi telah memberikan perubahan pada segala aspek kehidupan tidak terkecuali pada bidang pendidikan yang notabanya sebagai wahana dalam mengembangkan potensi manusia yang berkualitas. Sungguh merupakan tantangan yang berat bagi dunia pendidikan kita, ditengah globalisasi kebutuhan masyarakat akan kualitas pendidikan semakin meningkat seiring perkembangan globalisasi yang menuntut SDM yang berkualitas. Keefiktifan pendidikan di Negara kita sedang diuji oleh tantangan-tantangan pada jaman ini. Berkait dengan globalisasi, dapat diidentifikasi tantangan dunia pendidikan, yaitu

- a) Penyiapan sumber daya yang prima;
- b) Abrasi nilai-nilai budaya bangsa;
- c) Kaburnya identitas kebangsaan;
- d) Kemajuan IPTEK revolusi informasi yang mengaburkan kesadaran nasional dan mengancam integritas kebangsaan.

Keempat tantangan tersebut memaksa perlu dikembangkannya sistem pendidikan yang mampu memenuhi tantangan tersebut sehingga menciptakan peluang-peluang bagi generasi muda kita dalam memasuki era globalisasi. Era

⁷ Nurani Suyomukti, *Pendidikan berspektif Globalisasi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 42

globalisasi membawa dampak segala aspek dalam kehidupan baik ekonomi, social, budaya dan politik.

Di era globalisasi ini, dunia pendidikan pada umumnya sedang menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- a) Globalisasi dibidang budaya, etika dan moral sebagai akibat dari kemajuan teknologi dibidang transportasi dan informasi.
- b) Diberlakukannya globalisasi dan perdagangan bebas, yang berarti persaingan alumni dalam pekerjaan semakin ketat.
- c) Hasil-hasil Survey internasional menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah atau bahkan selalu ditempatkan dalam posisi juru kunci jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
- d) Masalah rendahnya tingkat social-capital. Inti dari social-capital adalah trus (sikap amanah).

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survei dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.⁸ Oleh karena itu perlu kesedaran bagi warga Indonesia untuk terus memperbaiki pendidikan kedepan.

2) Dikotomi Pendidikan di Indonesia

Dikotomi pendidikan islam juga terjadi pada pendidikan Islam di Indonesia. Sejak abad 1901 pemerintah belanda melalui *Enthisec Pilitic* sudah mempertemukan sekolah kepada bumi putra, belanda dengan kekuasaannya menggunakan strategi *outhounding pilotiek*⁹ untuk memisahkan ilmu agama dengan kurikulum disekolah sehingga dalam

⁸ Nurani Suyomukti, *Pendidikan berspektif Globalisasi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 41

⁹ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), hlm. 435.

system pendidikan pada saat itu pendidikan agama sama skali tidak diajarkan disekolah-sekolah mereka menganggap pendidikan agama adalah tanggung jawab orang tua dirumah. Kebijakan pemerintah belanda terhadap pendidikan di Indonesia sangat diskriminatif baik secara social, ras, anggaran, maupun pemeluk agama terhadap agama.¹⁰ Diskriminasi social misalnya terlihat pada perbedaan sekolah tempo dulu antara kaum elite dan kaum pribumi. Diskriminasi ras bisa dilihat dari klasifikasi sekolah pada jaman dulu pada anggaran pun terlihat pada pemberian anggaran yang lebih besar terhadap sekolah elite.

Dikotomi pendidikan di Indonesia belum selesai pada saat penjajahan tetapi berkelanjutan baik pada masa kemerdekaan, orde baru, reformasi maupun pasca reformasi. Dikotomi pendidikan tersebut semenjak diberlakukannya dua system pendidikan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Dengan orientasi tanggung jawab masing-masing pendidikan agama menaungi (madrasah dan pesantren) sedangkan pendidikan umum menaungi (persekolahan).¹¹

2. Alternatif dan Solusi Menghadapi Tantangan Global

Pendidikan Islam dengan berbagai karakteristiknya yang penuh dinamika tidak bisa dilepaskan dari persoalan-persoalan yang melingkupinya, mulai dari persoalan system yang dikembangkan, otonomi keilmuan, kurikulum, hingga orientasi output SDM (Sumber Daya Manusia) yang diharapkan. Persoalan-persoalan ini semestinya dapat dicarikan solusinya sebaik dan secepat mungkin. Maka dari itu, diperlukan suatu inovasi atau pemikiran yang visioner dengan menyusun berbagai strategi, diantaranya¹²

- a. Orientasi pendidikan tidak hanya berupa teori-teori, namun harus dibarengi dengan praktik. Praktek pembelajaran harus lebih diperbanyak. Sehingga siswa akan mudah mengembangkan keterampilannya.
- b. Dalam proses belajar mengajar, guru harus benar-benar mau terbentuk karakter kemandirian sebagai karakter yang dituntut dalam era global.

¹⁰ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 280.

¹¹ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 438.

¹² Sutrisno dan Muhyidin Albarobis, *Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial*, (Jogjakarta:2012), Hlm.79

- c. Guru harus benar-benar menguasai materi pelajaran dan ilmu mendidik. Hal ini bisa dilakukan dengan studi lanjut sesuai dengan spesialisasi, pelatihan, workshop, maupun studi banding ke institusi-institusi yang sudah maju.
- d. Perlunya pembinaan dan pelatihan tentang peningkatan motivasi belajar terhadap siswa. Harus ditanamkan pola pembelajaran yang berorientasi proses bukan hasil, sehingga siswa akan terbiasa untuk belajar maksimal dengan mementingkan pada substansi
- e. bukan formalitas. Profesi guru harus dihargai dengan maksimal. Mengembangkan budaya baca bagi kalangan anak usia sekolah maupun masyarakat umumnya. Pemerintah harus konsisten dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Contoh yang paling nyata adalah alokasi APBN untuk pendidikan seharusnya benar- benar 20 %.
- f. Perlunya dukungan dan paartisipasi komprehensif dari semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pendidikan. Perlu adanya kerjasama antar pengelola lembaga pendidikan, pemerintah, perusahaan dan masyarakat.¹³

3. Persiapan Sumber Daya Manusia Menghadapi Globalisasi

Perlunya landasan Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan kompetisi, yang harus dilakukan adalah penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kesiapan mental mempunyai landasanya itu ajaran agama Islam, landasan motivasi, inspirasi dan aqidah. Agar mampu menjawab tantangan dan menghadapi ancaman ajaran islam memberikan petunjuk sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan kesadaran kembali tentang tujuan hidup menurut islam. Baik manusia sebagai hamba Allah, maupun kholifah Allah. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

۝الدِّمَاءُ وَيَسْفِكُ فِيهَا يَافِسِدُ مَنْ فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالَوْا خَلِيْفَةً ۝الْأَرْضِ فِي جَاعِلٍ ۝إِنِّي لَلْمَلَكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ
 تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ ۝إِنِّي قَالَ لَكَ وَنُقَدِّسُ مُحَمَّدِكَ نُسَبِحُ وَنَحْنُ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan

¹³ Sutrisno dan Muhyidin Albarobis, *Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial*, Hlm.79

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 02).¹⁴

Dalam ayat di atas, penegasan kata iman dan taqwa sangatlah penting untuk dijadikan sebagai landasan hidup. Perlu disadarai, bahwa kepuasan lahiriyah yang dinikmati oleh manusia hanyalah sebatas sementara (fana). Dengan begitu diharapkan manusia akan sanggup mengatur dirinya, dan pada akhirnya mampu merasakan kenikmatan yang hakiki ketika manusia berbuat baik, baik yang berhubungan dengan khaliq maupun antar sesama umat manusia. Dengan demikian, ketika seseorang terbawa arus globalisasi, maka dia akan selalu ingat kesadaran terhadap pengamalan ajaran agamanya, yang telah menetapkan aturan hidup didunia dan diakhirat.

b. Mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat didunia, baik formalitas administratif sesuai ketentuan yang ada di dunia sendiri maupun hakiki.

c. Persiapan sumber daya manusia dengan kriteria pribadi berkualitas

1) Aspek Intelektual, antara lain :

Kemampuan Analisis, Kemampuan Fokus, Kemampuan Organisasi, Kemampuan Teknis Praktis, Kemampuan penguasaan multi bahasa, dasar; Indonesia dan Inggris; Pilihan tambahan : Mandarin, Perancis, Jepang Aspek Keterampilan:

2) Aspek Keperibadian;

Nilai-nilai dasar (Basic Values) Integritas Tinggi yang perlu dikembangkan, antara lain: Terbuka, Konsisten, Berorientasi hasil, Rajin, Disiplin, Kontrol Diri, Keberanian

d. Kebanggaan

Meliputi: Kesederhanaan, Pendengar yang baik, Bisa dipercaya, Mempunyai tujuan jelas, Memikirkan orang, Jujur, Memiliki prinsip, Memanfaatkan peluang, Mengakui kesalahan, Kemandirian, Kreatif.¹⁵

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), hlm. 06.

¹⁵Sutrisno dan Muhyidin Albarobis, *Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial*, Hlm.79

4. Implikasi Pendidikan Islam Dan Globalisasi.

Menurut salah satu pemikir pendidikan yaitu A. Malik Fadjar yang menarik adalah bahwa ia mengatakan, Saat ini lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mendisain model-model pendidikan alternative yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan sekarang ini A. Malik Fadjar, idealistik, yakni pendidika yang integralistik, humanistik, pragmatik dan berakar pada budaya kuat.¹⁶

Dengan kata lain, pendidikan yang diinginkan Malik Fadjar adalah pendidikan yang tidak memisahkan intelektualitas dan spritualitas. Pendidikan juga pada dasarnya memberi kebebasan kepada manusia untuk mengembangkan potensi-potensi yang adapada dirinya. Disisi lain ia juga menekankan bahwa pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan fisik manusia. Poin pemikiran penting yang ditegaskan Malik Fadjar adalah bahwa pendidikan harus mengacu kepada nilai-nilai luhur dan budaya sebuah bangsa. Sebagai seorang yang berlatar belakang guru, pemikiran Malik Fadjar dalam pendidikan tentu menarik untuk dikaji.

Ajaran-ajaran Islam relevan dengan aspek-aspek tertentu globalisasi. Relevansi globalisasi dengan ajaran Islam terdapat pada aspek-aspek berikut:

a. Islam dan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Globalisasi yang bersifat kompetitif mendorong umat berupaya secara sistematis untuk memproses pembangunan manusia menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, baik fisik intelektual maupun moral. Era globalisasi yang sebagian ditandai oleh maraknya bisnis dan perdagangan memberikan peluang pada umat untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan bisnis.¹⁷ Globalisasi yang membawa peningkatan industrialisasi akan membawa kemakmuran. Atau kemakmuran dapat dicapai melalui globalisasi industri. Setiap kenaikan kemampuan material suatu masyarakat adalah bernilai positif termasuk dari segi peningkatan harkat kemanusiaan masyarakat, baik

¹⁶Rusniati, "Pendidikan Nasional dan Tantangan Globalisasi: Kajian Kritis Terhadap pemikiran A Malik Fajar", hlm. 107.

¹⁷Ahmad Anwar, *Islam dan Globalisasi Pendidikan*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume3 Nomor1 Februari 2015 Halaman 146.

perseorangan maupun kelompok. Sebab harkat atau martabat kemanusiaan adalah kebahagiaan.

b. Islam dan Globalisasi Pendidikan

Globalisasi ditandai dengan kemajuan teknologi dan produksi. Kemajuan teknologi dan industri memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan ibadah dan memberikan peluang besar dalam pendidikan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Dan memang harus diakui bahwa teknologi sangat mendukung terciptanya proses belajar yang kondusif.¹⁸ Kemajuan teknologi ini kemudian telah banyak dipergunakan di pendidikan yang berbasis Islam seperti pondok pesantren. Pondok pesantren di Indonesia secara faktual telah berhubungan dan berkomunikasi dengan sistem nilai di luar dirinya tanpa dibatasi oleh stero tipe kebudayaan. Hal ini terindikasi dengan penggunaan produk-produk global seperti televisi, komputer, internet, dan sebagainya. Penggunaan produk-produk global ini memang dirasa ada manfaat dan pengaruhnya bagi kehidupan pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan cukup berarti bagi produktivitas pendidikannya. Dalam Muhtarom, Kiai Najib Suyuthi mengatakan bahwa tayangan televisi memberikan pengetahuan para santri atau pungguru-guru secara langsung, memperkaya informasi dan dapat mengembangkan semangat belajar. Pemakaian telepon memberikan kemudahan kemudahan bagi pelajar maupun kelembagaan.

c. Islam dan Modernisasi

Pengertian yang mudah tentang modernisasi adalah pengertian yang identik dengan pengertian rasionalisasi. Dan hal itu berarti proses perombakan pola pikir dan tata kerja lama yang tidak rasional dan menggantinya dengan pola pikir dan tata kerja baru yang lebih rasional. Kegunaannya ialah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal. Hal itu dilakukan dengan menggunakan penemuan mutakhir manusia di bidang ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan merupakan pemikiran manusia terhadap hukum-hukum obyektif yang menguasai alam, ideal, dan material sehingga alam ini

¹⁸Ahmad Anwar, *Islam dan Globalisasi Pendidikan*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume3 Nomor1 Februari 2015 Halaman 147.

berjalan menurut kepastian tertentu dan harmonis. Orang yang bertindak menurut ilmu pengetahuan (ilmiah) berarti ia bertindak menurut hukum alam yang berlaku. Oleh karena itu tidak melawan hukum alam malahan menggunakan hukum alam itu sendiri maka ia memperoleh daya guna yang tinggi. Jadi, sesuatu dapat disebut modern kalau ia bersifat rasional, ilmiah, dan bersesuaian dengan hukum-hukum yang berlaku dalam alam. Sebagai contoh, sebuah mesin hitung termudah dibuat dengan rasionalitas yang maksimal menurut penemuan ilmiah yang terbaru dan karena itu persesuaiannya dengan hukum alam paling mendekati kesempurnaan. Madjid, Nurcholis dalam "Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan" menyatakan bahwa bagi seorang muslim yang sepenuhnya meyakini kebenaran Islam sebagai *way of life*. Semua nilai dasar *way of life* yang menyeluruh itu tercantum dalam Kitab Suci AlQuran. Maka sebagai penganut *way of life Islam* dengan sendirinya juga menganut cara berpikir Islami. Demikianlah dalam menetapkan penilaian tentang modernisasi juga berorientasi pada nilai-nilai besar Islam.

Dengan kata lain, modernisasi merupakan suatu keharusan, bahkan sebagai kewajiban mutlak. Modernisasi merupakan pelaksanaan perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Dan modernisasi yang dimaksudkan di sini ialah menurut pengertian diatas. Dengan demikian, bahwa jelaslah bahwa modernisasi yang berarti rasionalisasi untuk memperoleh daya guna dalam berpikir dan bekerja yang maksimal guna kebahagiaan umat manusia adalah perintah Tuhan yang imperative dan mendasar. Modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah atau *sunatullah* yang haq. Sunatullah telah mengejawantahkan dirinya dalam hukum alam sehingga untuk dapat menjadi modern maka manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu (perintah Tuhan). Pemahaman manusia terhadap hukum alam melahirkan ilmu pengetahuan. Sehingga modern berarti ilmiah.

Dan ilmu Pengetahuan diperoleh manusia melalui akal (rasionalnya) sehingga modern berarti Ilmiah berarti pula rasional. Maksud sikap rasional ialah memperoleh daya guna yang maksimal Untuk memanfaatkan alam ini bagi kebahagiaan manusia. Oleh karena manusia yang memiliki keterbatasan kemampuannya maka tidak dapat sekaligus mengerti seluruh alam ini,

melainkan sedikit demi modern adalah juga berarti progresif dan dinamis. Jadi tidak bertahan kepada sesuatu yang telah ada dan karena itu bersifat merombak dan melawan tradisi-tradisi yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam hukum alam, tidak rasional, tidak ilmiah sekali pun dipihak lain juga ada keharusan menerima dan meneruskan, kemudian mengembangkan warisan generasi sebelumnya yang mengandung nilai kebenaran. Maka sekalipun bersikap modern namun kemodernan bersifat relatif sebab terikat ruang dan waktu. demikian, tidak seorang pun manusia berhak mengklaim suatu kebenaran insani sebagai suatu kebenaran mutlak kemudian dengan sekuat tenaga mempertahankan kebenaran yang dianutnya dari setiap perombakan. Sebaliknya karena menyadari kerelatifan kemanusiaan maka setiap orang harus bersedia lapang dada menerima dan mendengarkan suatu kebenaran dari orang lain. Demikianlah modernitas yang nampaknya hanya mengandung kegunaan praktis yang langsung tapi pada hakikatnya mengandung arti yang lebih mendalam yaitu pendekatan kepada kebenaran mutlak.

Pendidikan Islam dalam perkembangannya telah melalui berbagai suasana dan kondisi, dalam perjalanan panjang pendidikan Indonesia yang sudah hampir satu abad lamanya belum menemukan model yang ideal, dimana unsur budaya yang dominan sudah terkikis oleh perubahan zaman.¹⁹

5. Pendidikan Islam Dan Perubahan Kebijakan

a. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.²⁰ Pendidikan agama Islam harus diberikan sejak dini, mulai dari usia kanak-kanak, remaja, bahkan dewasa. Dalam Islam dikenal istilah pendidikan sepanjang hayat (*longlife education*). Artinya selama ia hidup tidak akan lepas dari pendidikan, karena setiap langkah manusia hakikatnya belajar, baik langsung maupun tidak langsung. Walaupun terdapat banyak kritik yang dilancarkan oleh berbagai kalangan terhadap pendidikan, atau tepatnya terhadap praktek pendidikan, namun hampir semua pihak sepakat bahwa nasib

¹⁹Hasan Langgulung, *Asas Asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna: 1987), hlm. 117.

²⁰Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Perspektif Islam*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.23.

suatu komunitas atau suatu bangsa di masa depan sangat bergantung pada kontribusinya pendidikan. Misalnya, sangat yakin bahwa pendidikanlah yang dapat memberikan kontribusi pada kebudayaan dihari esok. Pendapat yang sama juga bisa kita baca dalam penjelasan Umum Undang- Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (UU No. 20/2003), yang antara lain menyatakan: “Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara

b. Kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan islam

Sejak pada zaman penjajahan pendidikan agama mengalami dikotomi bahkan sampai pada era kemerdekaan dan post-kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka didirikan kementerian Agama RI pada tanggal 3 Januari 1946. Salah satu tugas dari kementerian agama adalah mengurus penyelenggaraan pendidikan agama. Sedangkan tugas dari kementerian pendidikan dan kebudayaan mengurus sekolah umum. System pendidikan agama Islam diasosiasikan dengan sistem pondok pesantren dan madrasah yang lebih menekankan pada nilai sikap dan amaliyah. Sedangkan system pendidikan umum dikenal dengan istilah persekolahan yang lebih mengutamakan pengembangan intelektual.²¹

1. Kebijakan pendidikan Islam pada masa orde lama

Setelah indonesia mendapat kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Penyelenggara pendidikan Islam mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Yaitu dengan memberi bantuan kepada lembaga pendidikan islam oleh Badan pekerja komite nasional pusat (BPKNP) pada 27 desember 1945 dengan menyebutkan bahwa: madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdaskan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah ia pula mendapat perhatiandan bantuan nyata tututan dan bantuan material dari pemerintah.²²

²¹Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), hlm. 438.

²²M Hasbulla, *Kebijakan Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 199

2. Kebijakan pendidikan islam pada masa orde baru

Kebijakan pertama yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu ialah

- a) Dikeluarkannya kebijakan tahun 1967, sebagai respon dari terhadap TAP MPRS No. XXVII tahun 1966 dengan melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah.
- b) Pada tahun 1970-an pemerintah mengeluarkan keputusan presiden No. 34 tanggal 18 april tahun 1972.
- c) Kepres no. 34 tahun 1972 dan dipertegas oleh inpres no. 15 tahun 1974 yang mnegatur operasional.
- d) TAP MPRS nomor XVII tahun 1966 menjelaskan “agama merupakan salah satu unsure mutlak dalam pencapaian tujuan nasional.
- e) TAP MPRS No. 2 tahun tahun 1960 adalah madrasah di bawah lembaga pendidikan otonom dibawah pengawasan Menteri Agama.²³

3. Kebijakan pendidikan Islam pada masa reformasi

- a) UU pendidikan tahun 1950 dan 1954 pasal 20 ayat 1 bahwa sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
- b) UU No 2 Tahun 1989 tidak lagi disebutkan disekolah negeri atau swasta dalam memberlakukan pelajaran agama.
- c) Diberlakukannya UU No. 2 tahun 1998 tentang system pendidikan nasional, lembaga pendidikan Islam menjadi bagian integral (sub-sistem) dari pendidikan nasional.
 1. Pada tahun 1970-an diterbitkannya SKB-3 menteri tahuun 1975 antara menteri dalam negeri, menteri agama dan meneri

²³M Hasbulla, *Kebijakan Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 202-204.

pendidikan dan kebudayaan tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah.²⁴

2. Pada tahun 1984 kemudian di susul dengan SKB-2 menteri antara agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang “pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah.
3. UU No. 2 tahun 1989 tentang system pendidikan nasional. Di dalam UU tersebut pendidikan madrasah diakui sebagai sub-sistem pendidikan nasional sebagaimana di atur dalam peraturan pemerintah (PP) No. 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
4. Reposisi pendidikan Islam di era otonomi daerah

Selama pemerintahan orde baru pemerintahan Indonesia penganut system sentralisasi, dimana semua kebijakan hampir semua hal ditentukan oleh pusat, hak hak daerah di ambil seakan daerah tidak mempunyai peran. Akan tetapi setelah de-sentralisasi kebijakan di atur oleh daerah masing-masing dengan tetap melihat undang-undang daerah. Kebijakan dalam dunia pendidikan islam sudah banyak di lakukan setelah turunnya otonomi daerah. Kebijakan pendidikan keagamaan daerah atau kota. Menyusun rencana kerja Tahunan Bidang Pendidikan dengan memprioritaskan:

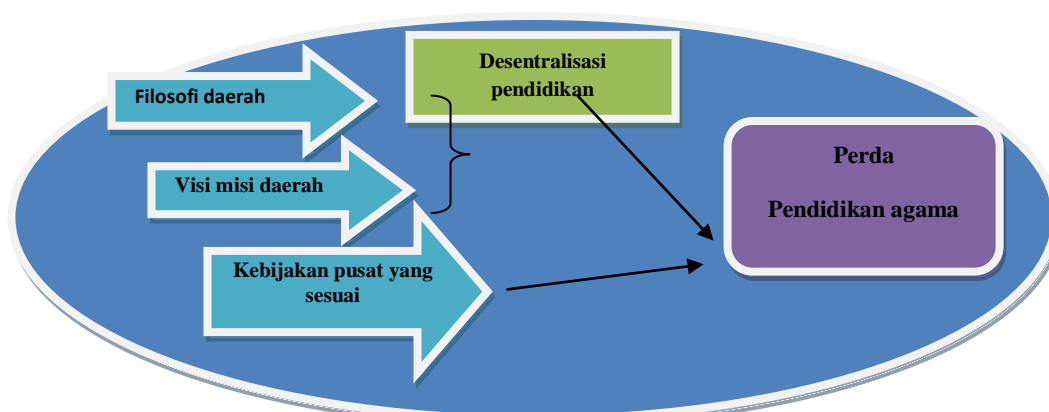
- a) Penuntasan wajib belajar 12 tahun (dua belas tahun);
- b) Penuntasan buta aksara;
- c) Penuntasan buta aksara al-qur’an;
- d) Pemenuhan standa pelayanan minimal;
- e) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan;
- f) Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidikan;
- g) Akreditasi sekolah.²⁵

²⁴Melalui SKB 3 Menteri dan beberapa kebijakan-kebijakannya terhadap sekolah-sekolah agama yang melaksanakan kurikulum agama mendapat perlakuan sama seperti sekolah sekolah umum pada jajaran yang sama. Mereka bisa pindah dan saling lanjut.

Hasil dari SKB 3 menteri ini menyebabkan terjadinya perubahan kurikulum madrasah dari 60% agama dan 40% umum menjadi 30% agama dan 70% umum. Pasa saat itu banyak masyarakat yang menolak dan menganggap sebagai “pendangkalan agama “ di madrasah.

Poin (c) merupakan secara jelas tentang usaha-usaha untuk perbaikan pendidikan islam dalam rangka memprioritaskan pendidikan agama. Pembuatan perda pendidikan agama sesuai dengan keinginan masyarakat di daerah yang didukung oleh perda di bawah atau di atasnya yang merupakan bentuk rekonstruksi sector pendidikan untuk menciptakan Local Capability.

Pemaparan di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Tabel 1.²⁶



Desentralisasi akan terelisasi mewujudkan hak-hak masyarakat, terutama penetapan pada pendidikan agama. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak akan terwujud manakala tidak ada dukungan dari filosofi daerah, visi, misi daerah serta kebijakan pusat yang sangat relevan. Tanpa dukungan tersebut desentralisasi kurang bisa meman.

1. Reposisi pendidikan madrasah

Sebagai lembaga instusional madrasah harus bisa melakukan inovasi-inovasi dan modifikasi agar tidak ketinggalan dengan akselerasi modernisasi dan perubahan. Akan tetapi perubahan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Pengembangan madrasah yang dilakukan sejak diberlakukannya UU No.2 tahun 1998 telah menunjukkan kemajuan. Indikator kemajuannya terlihat dari bangunan fisik madrasah (negeri) yang sudah mengalami perubahan.²⁷ Sejak berlakunya UU No.2 tahun 1989, pendidikan madrasah telah

²⁵Muhammad Banadi & barnawi, *Kebijakan Publik di bidang pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017. Hlm. 11o

²⁶Kebijakan yang dilakukan oleh kabupaten di Sumatra barat. Yaitu sawahlunyo/sijunjung

²⁷M Hasbulla, *Kebijakan Pendidikan Islam*, hlm. 220.

manjadi bagian dari pendidikan nasional. Oleh karenanya visi misi pendidikan nasional sejalan dengan visi nasional pendidikan.

Beberapa kebijakan pendidikan madrasah yang dilakukan oleh Departemen Agama antara lain.

- a. Kebijakannya memberikan ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama ummat islam. Yaitu memberikan wahana kepada madrasah untuk membina ruh atau praktik hidup islami.
- b. Kebijakannya memperjelas dan memperkuat keberadaan madrasah sebagai ajang membina warga yang cerdas, berkepribadian, dan produktif yang sederajat dengan sekolah.
- c. Kebijakan itu dalam rangka untuk menjadikan madrasah agar bisa menjawab tantangan zaman sebagai upaya merespon tuntutan zaman.²⁸

Selain dari itu kebijakan secara operasional dalam pendidikan madrasah dalam rangka menghadapi tantangan era globalisasi, Departemen Pendidikan Indonesia mengupayakan pemberdayaan melalui beberapa kebijakan seperti mendesain pendidikan islam seperti:

- a. Madrasah Terbuka (khusus tingkat Tsanawiyah)
- b. Madrasah Regular (sekolah umum bercirikan khusus agama islam)
- c. Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK)
- d. Madrasah Aliyah Program Keterampilan (MAPK)
- e. Madrasah Aliyah (MA)
- f. Madrasah Tsanawiyah (MTS)
- g. Madrasah Model
- h. Madrasah kembar.²⁹

²⁸M Hasbulla, *Kebijakan Pendidikan Islam*

²⁹M Hasbulla, *Kebijakan Pendidikan Islam*

2. Modernisasi pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia. Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam yang menekankan pada pentingnya moral dalam kehidupan.³⁰ Pesantren dalam sejarah pendidikan di Indonesia merupakan pendidikan yang tertua bahkan sebelum Belanda masuk ke Indonesia memperkenalkan pendidikan sekolah. Menurut beberapa catatan sejarah pesantren sudah sekitar tahun 1062 M. Sejak tahun 1970-an pesantren terangkat dalam wacana perubahan kaum intelektual untuk ikut dalam pembangunan dan modernisasi. Melalui beberapa aktivis alumni pondok pesantren yang terus berupaya untuk mewujudkan pesantren yang dinamis akhirnya pesantren mengalami aktualisasi, baik dalam bentuk resintensi maupun integrasi.

Upaya pondok pesantren dalam konteks otonomi daerah dapat kita kaji dalam dua hal baik *eksternal* maupun *internal*. Pengembangan yang bersifat *eksternal* diantaranya:

- a. Tetap menjaga budaya pondok pesantren sesuai dengan harapan masyarakat
- b. Pesantren yang sudah mendapat legitimasi sebagian dari pendidikan nasional. Harus tetap menjaga aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.
- c. Santri harus mampu bersaing dengan masyarakat yang majemuk
- d. Pesantren harus terbuka terhadap segala perkembangan dan segala perubahan yang terjadi.
- e. Pesantren harus dapat menjadi pusat studi.³¹

³⁰Mastuhu, *Dinamika Pendidikan Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS: 1989), hlm. 6. Menurut HA. Mukti Ali memberikan ciri-ciri pesantren sebagai berikut

1. Kyai, yang mengajar santri.
2. Santri, yang belajar dari kyai.
3. Masjid, tempat untuk menyelenggarakan pendidikan, shalat berjama'ah, dan sebagainya
4. Pondok tempat tinggal untuk para santri.

³¹M Hasbulla, *Kebijakan Pendidikan Islam*, hlm.222-223.

Sedangkan pengembangan yang bersifat *internal* diantaranya ialah.

- a. Kurikulum di pesantren hendaknya dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan santri baik minat, bakat maupun kemampuan.
- b. Tenaga pengajar dalam pesantren harus lebih kompetitif dalam rangka membentuk santri yang professional.
- c. Proses pembelajaran harus bisa mengembangkan daya nalar, kritik, dan kreatifitas santri.
- d. Sarana dan prasarana di pesantren harus lengkap biar bisa mendukung terhadap pembelajarn.
- e. Aktivitas di pesantren tidak hanya mengaji, shalat berjama'ah, tadarus dan membaca kitab kuning. Santri harus bisa menambah wawasan lain yang bisa mendukung terhadap bakat-bakat santri.³²

3. Dikotomi Pendidikan Madrasah Dan Pesantren

Pesantren yang awalnya sebagai lembaga pendidikan ke agamaan, dan pendidikan kemasyarakatan dengan fungsi elastis, individual dan populis³³ dengan tujuan belajar sebagai ibadah kepada Allah. Akan tetapi setelah berjalannya waktu dengan berbagai perubahan dan kebijakan dalam pendidikan di dalam pendidikan ke agamaan (pesantren dan madrasah) tujuan belajar utama di pesantren adalah sebagai ibadah berubah menjadi belajar agama untuk karir tertentu. Perubahan yang menjadi dasar ialah agar lulusan pesantren menghasilkan output yang bisa bersaing dengan masyarakat. Akibat perubahan tersebut pesantren berkeinginan untuk menerapkan system persekolahan dengan mengingrasikan pengetahuan umum dan kurikulum madrasah.

Perubahan tersebut semakin mencuat dengan keinginan untuk menciptakan tenaga elite di pesantren. Dengan demikian pesantren

³²M Hasbulla, *Kebijakan Pendidikan Islam*, hlm.224.

³³ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*.

yang awalnya mempunyai sifat elastis semua orang dapat belajar dengan tidak terhalang oleh biaya, kini menjadi terbatas dan berubah menjadi menjadi kaku dan seragam. Oleh karena itu pesanteran mengalami krisis identitas, krisis identitas ini semenjak ditetapkannya

- a) Program Madrasah Wajib Belajar (MWB) pada awal enam puluhan
- b) Kemudian dilanjutkan dengan lahirnya MTsAIN dan MAAIN akhir enam puluhan.
- c) Puncaknya pada tanggal 24 Maret 1975 terjadi perubahan yang mendasar melalui SKB Tiga Menteri.³⁴

Dengan kebijakan tersebut sekolah yang melaksanakan kurikulum pendidikan agama diperlakukan juga seperti sekolah umum. Yang pada awalnya sebelum turunnya SKB Tiga Menteri kurikulum madrasah 60% agama dan 40% umum³⁵, berubah menjadi 70% bidang umum dan 30% bidang agama.³⁶ Semenjak diterbitkannya SKB Tiga Menteri masyarakat menolak dan menganggap sebagai “pendangkalan agama”.

6. Sisi Pendidikan Islam

Sejak diberlakukannya UU no. 32 tahun 1999 yang kemudian disusul dengan UU no 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang secara substansial memberikan otonomi kepada daerah provinsi dan kabupaten serta pemerintahan kota suatu kewenangan serta otonomi yang lebih luas dibandingkan dengan era sebelumnya.³⁷ Kecuali beberapa urusan yang tetap ditangani oleh pemerintah pusat. Akan tetapi ada yang terlupakan dalam kebijakan terhadap Kementerian Agama. Dimana Kementerian Agama memiliki sekian banyak lembaga pendidikan yang harus diurus yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jenjang terendah sampai jenjang tinggi, lain lagi pendidikan yang berada di bawah binaan kementerian Agama seperti pondok pesantren.

³⁴ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*.

³⁵ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*.

³⁶ M. Ridwan Nasir, *Mencari Format Pendidikan Ideal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 91.

³⁷ Yulia Devi Ristanti, Eko Handoyo, “Undang-undang otonomi Daerah dan pembangunan ekonomi Daerah”, jurnal riset akutansi keuangan volume 2 no. 2 April 2017, hlm. 116. Daerah

1. MI & MTS (jenjang pendidikan dasar)
2. MA (jenjang pendidikan menengah)
3. STAIN, IAIN dan UIN (jenjang pendidikan tinggi).

Baik negeri maupun swasta, dalam konstalasi pengelolaan pendidikannya sangat dilematis dikarenakan semua tanggung jawabnya berada dibawah naungan Kementerian Agama yang seharusnya untuk marasah yang seharusnya di otonomkan. Dikatakan dilematis dari unsure anggarannya lembaga pendidikan islam tidak masuk APBD sementara kementerian agama tidak punya struktur pembiayaan yang tetap untuk membiayai lembaga pendidikan di bawahnya. Sementara kalo kita cermati dua undang-undang yang menyangkut pendidikan, yaitu UU No.20 tahun 2003 tentang UUSNP dan UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Tidak ditemukan peran kementerian agama di dalamnya. Dapat kita simpulkan bahwa penyelenggara pendidikan hanya menjadi kewenangan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan atau bisa dikatakan pengelola pendidikan satu atap. Sedangkan KEMENAG sebagai pembantu.

PENUTUP

Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Untuk memisahkan ilmu agama dengan kurikulum di sekolah sehingga dalam system pendidikan pada saat itu pendidikan agama sama sekali tidak diajarkan di sekolah-sekolah mereka menganggap pendidikan agama adalah tanggung jawab orang tua dirumah. Kebijakan pemerintah Belanda terhadap pendidikan di Indonesia sangat diskriminatif baik secara social, ras, anggaran, maupun pemeluk agama terhadap agama. Sejak pada zaman penjajahan pendidikan agama mengalami diskotomi bahkan sampai pada era kemerdekaan dan post-kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka didirikan kementerian Agama RI pada tanggal 3 Januari 1946. Salah satu tugas dari kementerian agama adalah mengurus penyelenggaraan pendidikan agama. Sedangkan tugas dari kementerian pendidikan dan kebudayaan mengurus sekolah umum. Dengan dibentuknya departemen agama tersebut diharapkan menjadi angin segar terhadap lembaga pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djauhari Maman. 2006. "Pendidikan untuk Apa...?", (*Jurnal Sositologi*). Desember.
- Banadi Muhammad & barnawi. 2017. *Kebijakan Publik di bidang pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bukhari Mochtar. 1995. *Transformasi Pendidikan*. Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-Art,
- M Hasbulla. 2015. *Kebijakan Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mastuhu. 1989. *Dinamika Pendidikan Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS.
- Nata Abuddin. 2011 *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suyomukti Nurani. 2008. *Pendidikan berspektif Globalisasi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Langgulong Hasan. 1987. *Asas Asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Lickona Thomas. 2012 *Educating for Character Mendidik Untuk Membentuk Karakter*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sutrisno dan Muhyidin Albarobis. *Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial*.
- Tafsir Ahmad. 2005. *Ilmu Pendidikan Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Ramayulis. 2012. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Ridlwani Nasir M.. 2010. *Mencari Format Pendidikan Ideal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra Daulay Haidar. 2009. *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta

Kumpulan Jurnal Artikel

- Yulia deviristanti, Eko handoyo. 2017. "Undang-undang otonomi Daerah dan pembangunan ekonomi Daerah", jurnal riset akutansi keuangan volume2 no.2 April.
- Rusniati. 2015 "Pendidikan Nasional dan Tantangan Globalisasi: Kajian Kritis Terhadap pemikiran A Malik Fajar", Jurnal Ilmiah DIDAKTITA, Agustus, Vol. 16. No.1
- Anwar Ahmad. 2015. *Islam dan Globalisasi Pendidikan*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume3 Nomor1 Februari.
- Nurhaidah, M. Insya Musa. 2015. "Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia" JURNAL PESONADASAR, Vol.3 No.3, April.
- www.academia.edu/12552898/Tantangan_Pendidikan_di_Era_Global, diposting tanggal 29 Desember 2018. Di akses pada jam 8.48 WIB